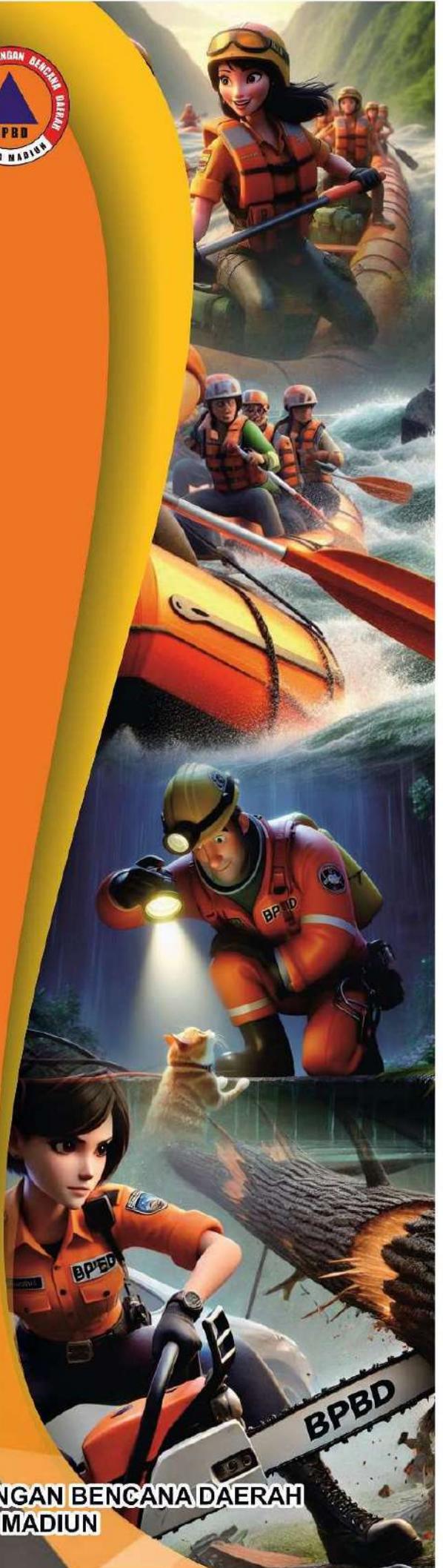




# LPIJ

TAHUN 2024



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2024 merupakan bentuk evaluasi untuk menjelaskan keberhasilan atau kurang berhasilnya penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah di tetapkan.

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini masih belum maksimal. Oleh karena itu upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Madiun, 18 Pebruari 2025

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN**



**H. WAHYUDI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671106 199003 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
DAFTAR TABEL .....	
DAFTAR GAMBAR .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	
1.1. LATAR BELAKANG .....	
1.2. LANDASAN HUKUM .....	
1.3. TUJUAN PENYUSUNAN .....	
1.4. GAMBARAN UMUM .....	
BAB II RENCANA KINERJA .....	
A. RENCANA STRATEGIS .....	
1. Tujuan .....	
2. Sasaran .....	
B. RENCANA KINERJA .....	
1. Sasaran Dan Indikator Sasaran .....	
2. Program .....	
3. Kegiatan .....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini ; .....	
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Bulan Terakhir ; .....	
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah ; .....	
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional Maupun Provinsi ( Jika ada ) ; .....	
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan ; .....	
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ; .....	

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang  
Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian  
Pernyataan Kinerja .....

B. REALISASI ANGGARAN .....

BAB IV PENUTUP .....

LAMPIRAN : .....

1. Pohon Kinerja BPBD Kota Madiun ;
2. Matrik Renstra (Terakhir 2024);
3. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024;
4. Penetapan Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Realisasi 2024
5. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 ;
6. Penghargaan

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan organisasi perangkat daerah. Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Madiun capaian kinerja dan realisasi anggaran. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran diukur capaiannya dan dianalisis dalam LKj ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun memiliki 3 (tiga) sasaran di tahun 2024 dimana untuk nilai pencapaian indikator sasaran secara keseluruhan melebihi target dari masing – masing indikator sasaran.

Pagu anggaran yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tahun 2024 sebesar Rp. 4.195.936.806,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.067.167.434,00 atau 96.93% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 128.769.372,00. Dengan demikian meskipun ada anggaran yang tidak terserap, tetapi pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menunjukkan efisiensi.

Tujuan : Menurunnya Resiko Bencana Daerah		
Indikator : Indeks Risiko Bencana		
Target : 120.50	Realisasi : 91.61	Capaian : 76.02%

1. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
Target : 85.75	Realisasi : 85.87	Capaian : 100.14%
2. Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik		
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat		
Target : 90.20	Realisasi : 92.31	Capaian : 102.34%
3. Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana		
Indikator : Indeks Ketahanan Daerah		
Target : 0.40	Realisasi : 0.51	Capaian : 127.5%

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta upaya mewujudkan good governance maka perlu disusun laporan kinerja yang merupakan aktualisasi semangat reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk lebih mendayagunakan aparatur negara, yaitu tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, juga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan akuntabel melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab. Setiap pejabat publik dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 dan Penyesuaian Dokumen Perencanaan, Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ini merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selama tahun 2024.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga tahapan pasca bencana sebagai implementasi dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yaitu Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara ;
- h. Surat Edaran Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022
- i. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- j. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 ;

- k. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023
- l. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun
- m. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- n. Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024
- o. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.
- p. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

### 1.3. Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Adapun tujuan penyusunan dari Pelaporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ini untuk memberikan :

- a. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- b. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya ;
- d. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

#### 1.4. Gambaran Umum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Madiun dikandung maksud sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga tahapan pasca bencana.

Implementasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana tertuang di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai berikut :

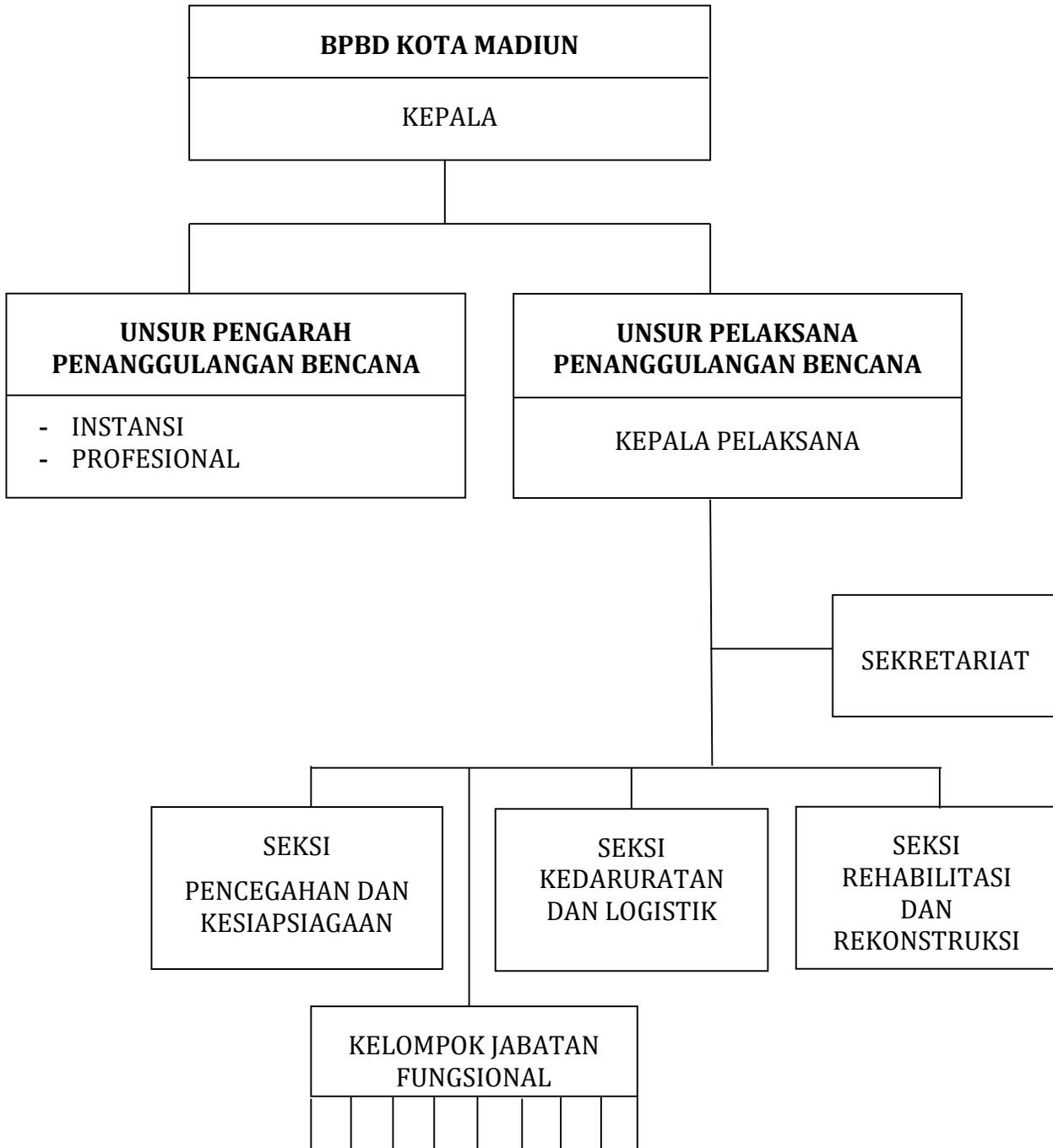
- a. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah :
  1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
  2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
  3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
  4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
  5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
  6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
  7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

- b. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **Struktur Organisasi**

Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terdapat Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN**



### Sumber Daya BPBD Kota Madiun

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun di dukung oleh sumber daya yang dimiliki, diantaranya :

- Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun saat ini memiliki atau di dukung oleh 10 (sepuluh) orang pegawai PNS, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jumlah PNS		Jumlah Tenaga Kontrak		Pendidikan						Golongan					Jabatan / Eselon			
	L	P	L	P	S D	S M P	S M A	D 3	S 1	S 2	IV	III	II	I	TK	II	III	IV	Staf/ Pelaksana
1.	5	5	0	0	0	0	3	2	4	1	2	4	4	0	0	0	1	3	6

Berdasarkan tabel diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun memiliki jumlah Pegawai sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jenis kelamin Laki – laki yaitu 5 (lima) orang, dan Perempuan 5 (lima) orang. Dengan tingkat Pendidikan sebagian besar Sarjana/S1 : 4 (empat) orang, S2 : 1 (satu) orang, Sarjana Muda/D3 : 2 (dua) orang, SMA/ sederajat sejumlah 3 (tiga) orang,

Dari 10 (sepuluh) orang pegawai tersebut dilihat dari tingkat golongan, paling banyak terdiri dari Golongan III : 4 (empat) orang ; Golongan II : 4 (empat) orang ; Golongan IV : 2 (dua) orang.

Jabatan berdasarkan Eselon tersedia sebagai berikut : Eselon II : 0 (kosong), Eselon III : 1 ( satu ) orang, Eselon IV : 3 (tiga) orang dan Staf/Pelaksana sejumlah : 6 (enam) orang.

- Sarana Prasarana Kantor

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	1	Baik
2.	Peralatan Dan Mesin	693	Baik
3.	Gedung Dan Bangunan	4	Baik
4.	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	3	Baik
	..... (lainnya)		

## Isu Strategi

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan serta memperhatikan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun dan tugas pokok serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai alat managerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun harus memperhatikan isu – isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan.

Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Madiun, dengan konsekwensi menuntut adanya perubahan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan pada kegiatan penanggulangan bencana.

Perubahan peran dari responsif dan reaktif ke arah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi, Misi dan program Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Madiun pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan adalah berkaitan dengan :

1. Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana ;
2. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial ;
3. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana ;
4. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait saat tanggap darurat bencana ;
5. Masih terdapatnya potensi bencana di Kota Madiun.

Isu Strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yaitu :

1. Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana ;
2. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kebencanaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ;
3. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana ;
4. Masih terdapatnya potensi bencana di Kota Madiun ;

Isu Gender :

Penanganan bencana sering kali masih banyak dilakukan oleh para laki – laki. Dan dalam penanganan bencana yang terjadi sewaktu - waktu ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam menanganinya secara proporsional tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender maupun status sosial secara adil dan merata tanpa terkecuali.

Meskipun urusan pemadam kebakaran sudah tidak menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tetapi secara teknis apabila sewaktu-waktu ada laporan dari Call Center 112 ataupun laporan dari warga langsung telah terjadi kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dengan adanya Team Reaksi Cepat (TRC) siap membantu dan berperan aktif dalam penanganan darurat kebakaran disamping melaksanakan tugas utama penanganan bencana yang sudah menjadi Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam upaya untuk mencapai arah dan prioritas pembangunan di Kota Madiun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mendasar pada aspek – aspek yang meliputi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas serta lingkup luas wilayah Kota Madiun.

Sebagai unsur pelaksana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun melaksanakan fungsi koordinasi dengan Dinas atau Instansi vertikal dan horizontal di daerah, lembaga usaha dan pihak lain yang diperlukan dalam tahap pra bencana, saat darurat atau terjadinya bencana dan pasca bencana.

Selain itu melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana, juga sebagai fungsi pelaksana berperan mengkoordinasikan, mengintegrasikan dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi serta penyelenggaraan kebutuhan penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

#### **A. Rencana Strategis**

##### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah menetapkan **Tujuan** organisasi yaitu : **“Menurunnya Resiko Bencana Daerah”** dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRB).

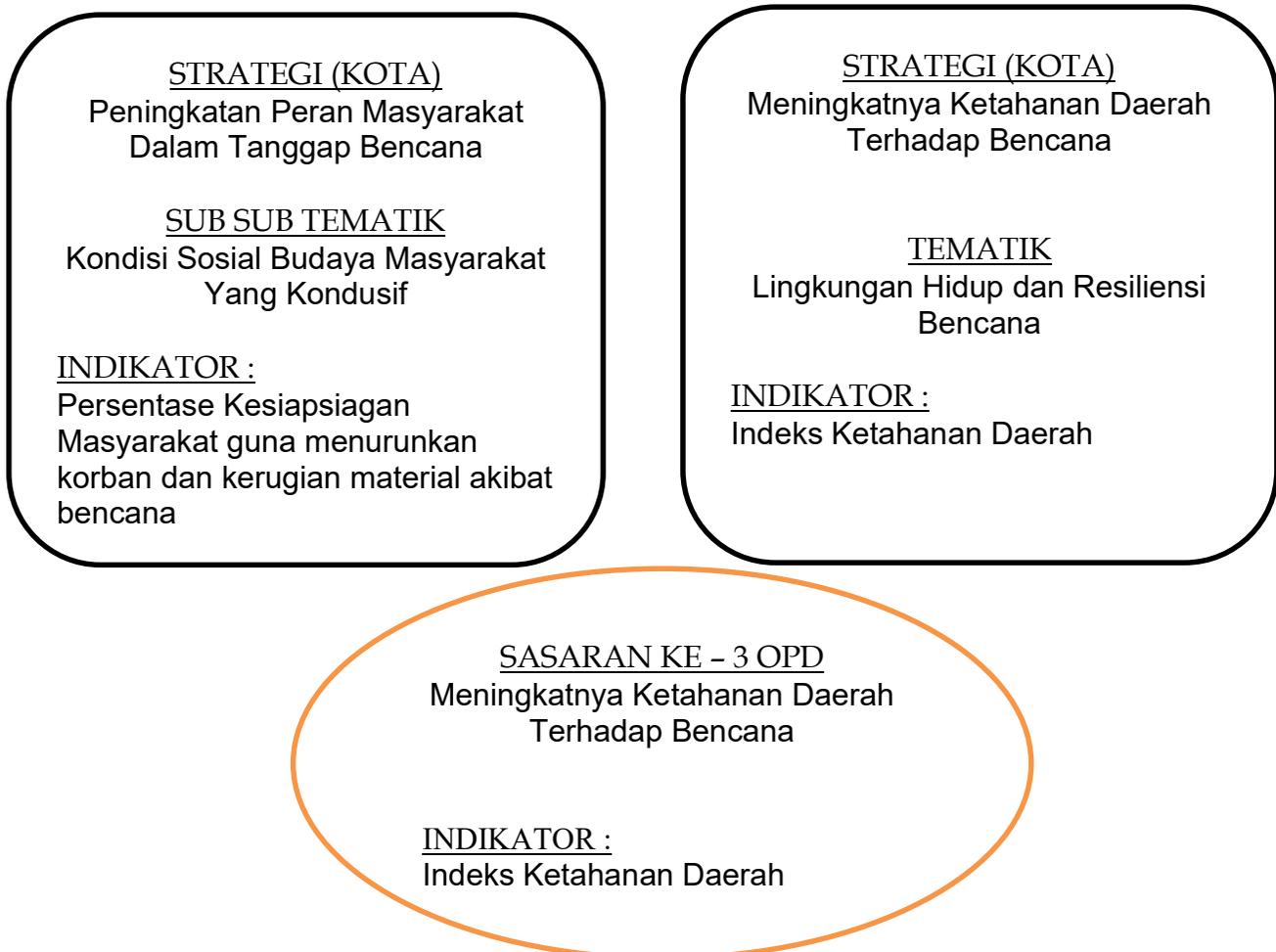
## 2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

**Sasaran** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ;
2. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik ;
3. Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana.

➤ Keterkaitan Strategi Kota ( Sub Tema / Sub Tematik Kota ) dengan Sasaran OPD.



## INDIKATOR KINERJA

Adapun untuk mengetahui lebih jelas tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun bisa di lihat dalam tabel di bawah ini.

No	Tujuan	Indikator	Kondisi Awal 2022	Kondisi Akhir 2024
1.	Menurunnya Resiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	121.06 indeks	120.50 indeks

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	85.25 Skor	85.25 Skor	85.75 Skor
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	90.20 Indeks
3.	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	-	-	-	0.35 Indeks	0.40 Indeks

### B. Rencana Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja setiap perangkat daerah tercapai apabila indikator dari sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai.

Pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah menetapkan Sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.75 Skor
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.20 Indeks
3.	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.40 Indeks

Tabel Program dan Anggaran yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.820.671.806,00	-
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.375.265.000,00	-
	Jumlah	Rp. 4.195.936.806,00	

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut dari dana APBD Kota Madiun Tahun 2024 sebesar Rp. **4.195.936.806,00** (Empat Milyard Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah).

Berikut Program Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2024 :

#### 1. Program

Adapun Program Kegiatan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan dana sebesar Rp. 2.820.671.806,00
2. Program Penanggulangan Bencana, dengan dana sebesar Rp. 1.375.265.000,00

#### 2. Kegiatan

Guna melaksanakan Program tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2024 melakukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.381.000,00 ;
    - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan dana sebesar Rp. 1.381.000,00.
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.710.324.806,00 ;
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp. 1.710.324.806,00.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 ;
  - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,00.
  
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.945.000,00 ;
  - Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dana sebesar Rp. 75.945.000,00.
  
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 413.773.000,00 ;
  - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp. 413.773.000,00.
  
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 419.248.000,00 ;
  - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan dana sebesar Rp. 249.868.000,00 ;
  - Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan dana sebesar Rp. 152.850.000,00
  - Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dana sebesar Rp. 16.530.000,00.

## 2. Program Penanggulangan Bencana

- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.948.000,00 ;
  - Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) dengan dana sebesar Rp. 26.948.000,00
  
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.134.461.000,00
  - Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan dana sebesar Rp. 27.484.000,00

- Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 889.410.000,00
  - Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kontijensi dengan dana sebesar Rp. 48.000.000,00
  - Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan dana sebesar Rp. 42.204.000,00
  - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota dengan dana sebesar Rp. 9.542.000,00
  - Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 117.821.000,00
- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 93.410.000,00.
    - Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Edukasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 83.460.000,00
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 9.950.000,00
- Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.446.000,00.
    - Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota dengan dana sebesar Rp. 120.446.000,00

### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi Pemerintah, serta sebagai upaya mewujudkan good governance juga dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Selaku pengemban amanah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berkewajiban menyusun atau membuat Laporan Kinerja berdasarkan capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dalam bentuk laporan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2024 yang penyusunannya mengacu pada Penyesuaian Dokumen Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2024.

Untuk setiap sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

#### ➤ **1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

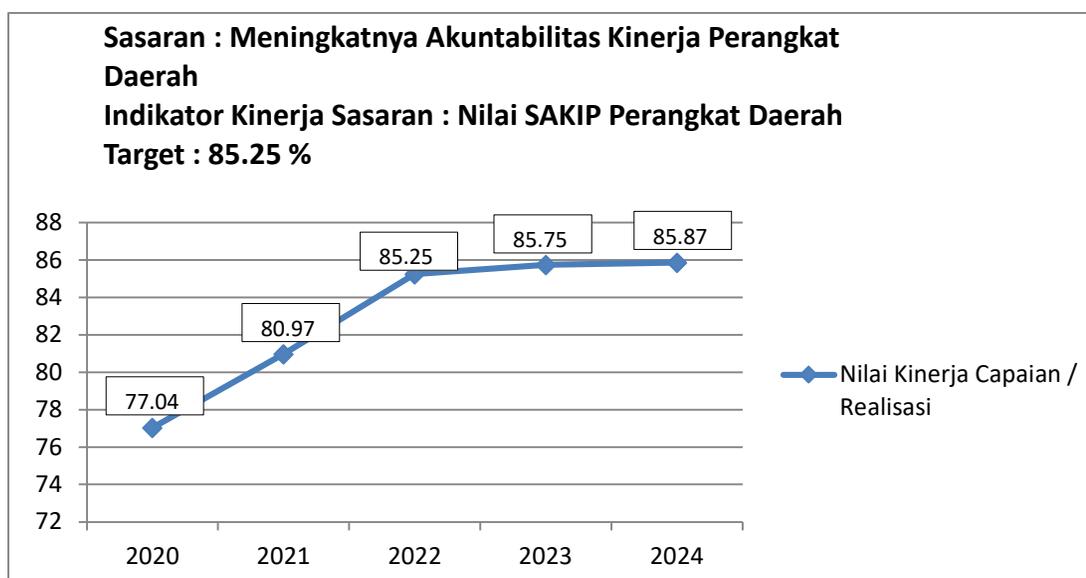
- a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024.

Capaian Kinerja dengan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” pada Tahun 2024 menggunakan indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.75 Indeks	85.87 Indeks	100.14 %

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi sasaran dari “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” melebihi target dari yang ditentukan.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Dari Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 nilai AKIP naik tinggi dari tahun 2021 dikarenakan sudah adanya keselarasan dokumen pendukung perencanaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Yang diikuti dengan tahun selanjutnya meskipun mengalami kenaikan sedikit dari tahun 2023 di tahun 2024.

- c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Penyesuaian Dokumen Perencanaan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024 dibandingkan dengan akhir Renstra
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.75 Skor	85.87 Skor	100.14%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” pada tahun 2024 bila dibandingkan sampai dengan akhir Renstra di Tahun 2024 telah melalui target.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional Realisasi kinerja dari Indikator Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian kinerja di Standar Nasional sudah menunjukkan predikat Baik.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja 2024	Realisasi Kinerja Provinsi	Realisasi Kinerja Nasional
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.87 Indeks	N/A	N/A

Walaupun Indikator kinerja dari sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” ini sudah mencapai predikat Memuaskan (A), namun masih perlu ada upaya untuk terus meningkatkan capaian kinerjanya lagi.

- e. Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja dari Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” ini perlu diuraikan beberapa faktor yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalannya diantaranya :

1. Faktor Pendorong :

- a. Adanya kerjasama internal (Sekretariat, Seksi dan Tim Reaksi Cepat (TRC) / Pusdalops pada BPBD Kota Madiun) ;
- b. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan OPD lainnya
- c. Adanya program kegiatan yang telah dilaksanakan
- d. Adanya pendampingan dari Menpan RB dalam proses evaluasi AKIP

2. Faktor Penghambat :

- a. Lambatnya koordinasi dengan Seksi2 terkait data dukung

3. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target :

- a. Telah dilaksanakannya koordinasi internal
- b. Telah dilaksanakannya koordinasi dengan OPD lainnya
- c. Telah dicukupinya data dukung kelengkapan penilaian AKIP

4. Rencana Tindak Lanjut :
  - a. Meningkatkan koordinasi dengan Sekretariat maupun Seksi2 terkait tata kelola pemerintah guna kecukupan data dukung SAKIP
  - b. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif lagi dengan OPD lain.
  
- f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 

Program yang menunjang keberhasilan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan dalam program ini didukung oleh beberapa kegiatan, diantaranya :

  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

➤ **2. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik**

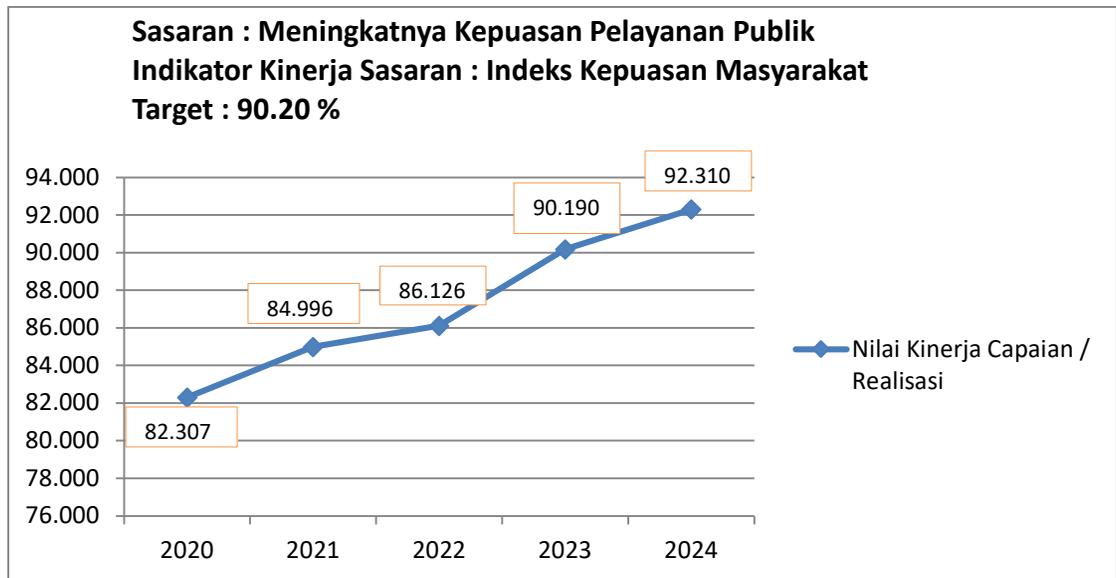
- a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024.

Capaian Kinerja dengan sasaran “Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik” pada Tahun 2024 menggunakan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.20 Indeks	92.31 Indeks	102.34%

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi sasaran dari “Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik” melebihi target dari yang ditentukan.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Dari Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 nilai indeks kepuasan Masyarakat ini mengalami kenaikan yang tinggi dikarenakan apabila ada kejadian bencana yang sewaktu – waktu terjadi Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana langsung melakukan penanganan sampai tuntas. Yang diikuti sampai dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan nilai juga dari tahun sebelumnya yang disebabkan apabila ada laporan dan kejadian langsung melakukan penanganan bencana.

- c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Penyesuaian Dokumen Perencanaan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024 dibandingkan dengan akhir Renstra
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	92.31%	-

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik” pada tahun 2024 bila dibandingkan sampai dengan akhir Renstra di Tahun 2024 tidak bisa

diukur dikarenakan sasaran ini baru ada di Tahun 2024 dan tidak ada dalam dokumen Renstra.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional  
Realisasi kinerja dari Indikator Sasaran “Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik” pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian kinerja di Standar Nasional : Nihil.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja 2024	Realisasi Kinerja Provinsi	Realisasi Kinerja Nasional
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.31 Indeks	N/A	N/A

Walaupun Indikator kinerja dari sasaran “Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik” ini sudah mencapai predikat Sangat Baik, namun masih perlu ada upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- e. Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja dari Sasaran “Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik” ini perlu diuraikan beberapa faktor yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalannya diantaranya :

1. Faktor Pendorong :
  - a. Ketersediaan Tim yang terlatih dan kompeten di bidangnya
  - b. Pemberi layanan memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi
2. Faktor Penghambat :
  - a. Kurangnya komunikasi antar tim internal sehingga menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
3. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target :
  - a. Melakukan evaluasi kinerja pegawai secara rutin
  - b. Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar tim melalui peningkatan sumber daya manusia

4. Rencana Tindak Lanjut :
  - a. Memberikan penghargaan bagi pegawai berdedikasi
  - b. Menyediakan pelatihan atau penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk semua petugas pemberi layanan.
  
- f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 

Program yang menunjang keberhasilan sasaran “Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik” yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan dalam program ini didukung oleh beberapa kegiatan, diantaranya :

  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
  - Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

➤ **3. Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana**

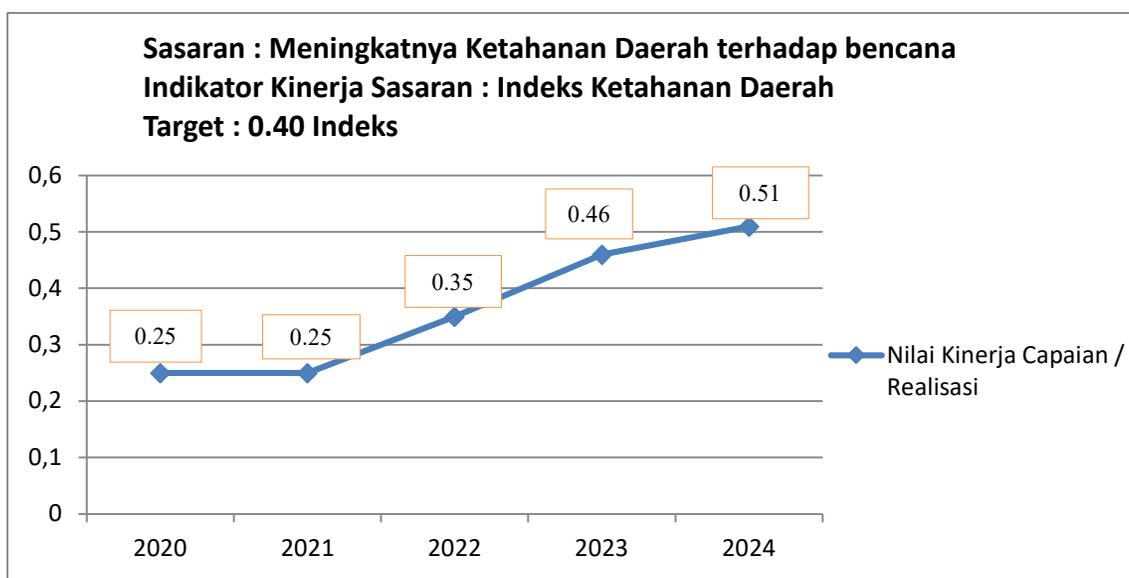
- a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024
 

Capaian Kinerja dengan sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana” pada Tahun 2024 menggunakan indikator kinerja “Indeks Ketahanan Daerah”.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.40 Indeks	0.51 Indeks	127.5%

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi sasaran dari “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana” melebihi dari target yang ditentukan.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Dari Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 indeks ketahanan daerah terhadap bencana mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2022 dikarenakan adanya kesadaran dan partisipasi aktif daru masyarakat dan perangkat daerah dalam penanganan bencana yang diikuti dengan kenaikan juga di tahun berikutnya.

- c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Penyesuaian Dokumen Perencanaan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024 dibandingkan dengan akhir Renstra
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.40	0.51	127.5%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana” pada tahun 2024 apabila dibandingkan sampai dengan akhir Renstra di Tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Standar Nasional Realisasi kinerja dari Indikator Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana” pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian kinerja di Standar Nasional yaitu Nihil.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja 2024	Realisasi Kinerja Provinsi	Realisasi Kinerja Nasional
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.51	N/A	N/A

- e. Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja dari Sasaran ini perlu diuraikan beberapa faktor yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan diantaranya :

1. Faktor Pendorong

- a. Penerapan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Madiun
- b. Peningkatan kapasitas dan fungsi informasi
- c. Kemandirian Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Lembaga Relawan Bencana yang ada di daerah

2. Faktor Penghambat

- a. Ancaman potensi bahaya yang dapat terjadi
- b. Kerentanan dan kerawanan wilayah terhadap bencana
- c. Kemampuan daerah / Masyarakat untuk mengurangi resiko dan kerugian akibat bencana

3. Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target :

- a. Melakukan Mitigasi untuk mengurangi dampak resiko bencana
- b. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana
- c. Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi bencana kepada Masyarakat, Swasta dan Lembaga Pemerintah
- d. Memperkuat kelembagaan bencana seperti Destana, FPRB, dan Relawan

4. Rencana Tindak Lanjut :

- a. Pembuatan Dokumen Rencana Kontijensi bencana sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana
- b. Mengadakan pelatihan dan edukasi bencana kepada Masyarakat, Lembaga PEmerintah / Swasta, dan Pendidikan/Sekolah
- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar OPD terkait dan Lembaga / Relawan Bencana dalam penanggulangan bencana
- d. Melakukan Kajian Resiko Bencana (KRB)

f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana” yaitu Program Penanggulangan Bencana yang didukung oleh Kegiatan :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota ;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana ;
3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana.

➤ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah cara untuk mengetahui seberapa optimal pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Analisis ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan.

Efisiensi apabila realisasi anggaran tahun 2024 kurang dari atau sama dengan tahun lalu dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan.

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja	(Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja)- Realisasi Anggaran
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100$	6	7	$8 = 5 \times 6$	$9 = 8 - 7$
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,75	85,87	100,14%	1.381.000	1.072.000	1.382.932,59	310.932,59
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,2	92,31	102,34%	3.912.606.806	3.785.607.341	4.004.132.308.89	218.524.867.89
Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,4	0,51	120,00%	281.949.000	280.488.093	338.338.800	57.850.707

Terhadap Bencana								
					4.195.936.806	4.067.167.434	4.343.854.041,48	276.686.607,48
				Efisiensi = (total 9/total 6) x 100				6.59%

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berdasarkan dari hasil perbandingan rata – rata persentase capaian kinerja dengan rata – rata penyerapan anggaran diperoleh hasil dengan Efisiensi sebesar : 6,59%.

Faktor yang mendorong hasil efisiensi tersebut antara lain :

1. Penghematan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
2. Sumber daya manusia yang kompeten dalam penanganan bencana
3. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai

#### ➤ Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender adalah strategi dalam pelaksanaan Pembangunan responsive gender untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (Gender Equality) sebagai tujuan ke-5 Sustainable Developments Goals.

Sampai dengan saat ini Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan oleh semua tingkatan Pemerintah dengan kewajiban untuk memenuhi prasyarat – prasyarat gender.

Dalam rangka pengarusutamaan gender di Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun pada Tahun 2024 diwajibkan menyusun anggaran yang berbasis gender.

Berikut Analisa Gender yang telah disusun dalam rangka pengajuan anggaran Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan anggaran yang responsive gender pada kegiatan dan sub kegiatan :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
  - Sosialisasi. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  
Sub Kegiatan :
  - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
  - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

**REKAPITULASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) S/D TRIWULAN IV TAHUN 2024  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN**

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan Responsif Gender	Kinerja		Keuangan			Ket.
		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
1.	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan : - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	100 Orang	100 Orang	26.948.000	26.237.500	710.500	
2.	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
	Sub Kegiatan : - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9 Kawasan	10 Kawasan	27.484.000	27.474.000	10.000	
	- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	37 Orang	37 Orang	889.410.000	888.000.000	1.410.000	
	- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	117.821.000	117.395.093	425.907	
	<b>Jumlah</b>			<b>1.061.663.000</b>	<b>1.059.106.593</b>	<b>2.556.407</b>	

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN  
  
H. WAHYUDI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196711061990031009

Matrik GAP ( GENDER ANALYSIS PATHWAY )  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN

Tahun : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan / Program Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan Dan Rencana Kedepan	Pengukuran Hasil	Indikator Kinerja
<b>Kebijakan :</b> Meningkatkan pengetahuan dan informasi masyarakat/warga dalam menghadapi ancaman bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi KIE Tahun 2023 dilaksanakan sejumlah 330 orang untuk Laki - Laki sebanyak : 198 orang dan Perempuan sebanyak 134 orang yang meliputi perwakilan dari 9 Kecamatan di Kota Madiun	<b>Akses :</b> Jumlah Peserta Sosialisasi KIE Tahun 2023 dimana jumlah peserta Laki - Laki lebih banyak daripada peserta Perempuan.	Keterbatasan pengetahuan dalam penanganan bencana dan upaya mengatasinya	Persepsi masyarakat bahwa dalam penanganan suatu bencana atau kejadian adalah untuk laki laki	Meningkatkan pengetahuan dan informasi masyarakat baik laki - laki maupun perempuan dalam pemahaman dan informasi tentang kebencanaan	<b>Kegiatan :</b> Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Penduduk yang tinggal di Daerah rawan bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi KIE Tahun 2023 dilaksanakan sejumlah 330 orang untuk Laki - Laki sebanyak : 198 orang dan Perempuan sebanyak 134 orang yang meliputi perwakilan dari 9 Kecamatan di Kota Madiun	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan
<b>Kegiatan :</b> Penguatan informasi dan edukasi dalam menghadapi ancaman bencana	Data Bencana sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut: Banjir/Genangan Air : 13 kali ; Angin Puting Belulang/ Angin Kencang yang menyebabkan pohon tumbang : 58 kali ; rumah roboh : 9 rumah ; Pencarian dan Pertolongan manusia : 15 kali, Evakuasi binatang : 118 kali serta kebakaran lahan dan rumah : 77 kejadian	<b>Pertilpaal :</b> Peserta Sosialisasi KIE Tahun 2023 untuk peserta Laki-Laki lebih tinggi minatnya	Keterbatasan sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan kegiatan ini	Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya perempuan dalam pencegahan dan penanganan suatu bencana	Meningkatkan informasi dan edukasi dalam menghadapi ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	<b>Output :</b> Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan edukasi dalam menghadapi ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Narasumber dipedulkan guna mendukung kegiatan dimaksud, dengan jumlah Narasumber Laki-Laki sebanyak : 2 Orang dan Perempuan : 1 Orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana
<b>Tujuan :</b> Meningkatkan pemahaman dan informasi kepada masyarakat untuk meminimalisir korban akibat bencana	Materi yang diberikan tentang cara menghadapi atau kesiapsiagaan dalam penanganan bencana dimana kegiatan masih netral gender	<b>Kontrol :</b> Kebijakan masih netral gender sehingga peserta yang diambil oleh Kepala Kelurahan masih banyak laki - laki	Kebijakan tentang calon peserta masih netral gender			<b>Outcome :</b> Meningkatnya informasi dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana		Materi : 100% tentang pengetahuan kebencanaan
<b>Katompok Sasaran :</b> Masyarakat yang tinggal tinggalnya di kawasan rawan bencana	Narasumber dipikirkan guna mendukung kegiatan dimaksud, dengan jumlah Narasumber Laki-Laki sebanyak : 2 Orang dan Perempuan : 1 Orang	<b>Manfaat :</b> Kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat agar siap dan tanggap dalam penanganan bencana						Peserta dari warga masyarakat perwakilan dari 9 Kecamatan dan Kelurahan Kota Madiun Untuk Narasumber Laki-Laki : 2 Orang dan Perempuan : 1 orang

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN  
  
H. WAHYUDI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196711061990031009

➤ Inovasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah membuat Inovasi yaitu :

1. Tagana (Inovasi yang berkaitan dengan penguatan kapasitas masyarakat menanggulangi bencana yang dilakukan secara berkelanjutan) ;
2. Rescast (Pemberian informasi kebencanaan yang akan dilakukan secara rutin dengan mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya terutama bencana).

**B. REALISASI ANGGARAN**

Untuk mewujudkan kinerja organisasi yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja bisa dilihat dalam pengelolaan keuangan Tahun 2024 melalui tabel realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Rutin	2.820.671.806,00	2.766.456.341,00	98.08
2.	Belanja Non Rutin (Program)	1.375.265.000,00	1.300.711.093,00	94.58
	Jumlah Belanja	4.195.936.806,00	4.067.167.434,00	

Dimana untuk Anggaran Rutin ini mendukung 1 (satu) Program dengan 6 (enam) Kegiatan dengan capaian 98.08%. Sedangkan untuk Anggaran Non Rutin sebanyak 1 (satu) Program dan 4 (empat) Kegiatan dengan capaian serapan 94.58%.

Adapun capaian kinerja dengan penyerapan anggaran untuk masing – masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Program	Anggaran ( Rp )	Realisasi (Rp )	Persentase ( % )
1	2	3	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,381.000,00	1.072.000,00	77.625
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.819.290.806,00	2.765.384.341,00	98.088
		Program Penanggulangan Bencana	1.093.316.000,00	1.020.223.000,00	93.315
3.	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	281.949.000,00	280.488.093,00	99.482

	Terhadap Bencana				
		Jumlah	4.195.936.806,00	4.067.167.434,00	96.931

Sedang untuk Inovasi atau penghargaan yang pernah diraih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selama Tahun 2024 yaitu Penghargaan Nilai SAKIP Terbaik IV : 85.87 ( A ).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian keberhasilan sasaran capaian kinerja yang telah dicapai sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dengan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 serta dalam mewujudkan good governance yang sudah terealisasi sesuai dengan target dan efisien.

Capaian Kinerja yang telah dicapai berdasarkan sasaran dan indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2024 semuanya dapat terealisasi bahkan sampai melebihi 100%. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi seluruh komponen, baik dari masyarakat, pemangku kepentingan (Stakeholder) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun maupun para Team Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana. Namun ada beberapa kendala atau masalah yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan upaya - upaya yang telah dilaksanakan guna mengatasi kendala tersebut yaitu dengan pemanfaatan peralatan penanggulangan bencana dan logistik yang ada secara maksimal serta penggunaan yang efisien dan efektif terhadap minimnya sarana dan prasarana atau peralatan penanggulangan bencana serta kurangnya logistik dalam pemenuhan penanggulangan bencana.

Berdasarkan capaian kinerja yang sudah tercapai dengan target yang telah ditentukan dan untuk tindak lanjut ditahun berikutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun akan tetap mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik lagi dengan melanjutkan program kegiatan yang telah direncanakan dengan melakukan upaya - upaya pencegahan bencana, pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana struktural dan non struktural, kesiapsiagaan apabila terdapat potensi terjadinya bencana, mengembangkan sistem komando penanganan darurat bencana, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kejadian bencana.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas bagi berbagai pihak yang membutuhkan serta sebagai upaya perbaikan pelaksanaan program kegiatan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN :

- a. Pohon Kinerja BPBD Kota Madiun ;
- b. Matrik Renstra (Terakhir 2024);
- c. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024;
- d. Penetapan Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Realisasi 2024;
- e. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 ;
- f. Penghargaan

- E-KAK
- Dashboard
- Perencanaan OPD
  - Strategi Arah Kebijakan
  - Master Usulan
  - Tujuan OPD
  - Sasaran OPD
  - Pohon Kinerja Kota
  - Pohon Kinerja**
  - Pohon Cascading
  - Info OPD
  - Indikator
  - Peta Rencana SPBE
  - Pagu Perencanaan
  - Pagu SIPKD
  - Master Program Kegiatan
  - Anggaran

### Pohon Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Tahun 2024

Pohon Kinerja OPD	
Clone	
Nama OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan 1	Menurunnya Resiko Bencana Daerah
Indikator	Indeks Risiko Bencana
Tujuan 2	Peningkatan kualitas pelayanan publik
Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Tahun	2024

Tampilkan Semua + Strategi Baru

Tabel VI.1  
Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan  
Serta Pendanaan Perangkat Daerah  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Madiun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Loka	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
				<u>Tahun 2021 - 2022 :</u> Cakupan penanganan penanggulangan bencana bencana	100%		-		-		-		-			BPBD	Kota Madiun
				<u>Tahun 2022-2024:</u> Indeks Risiko Bencana	-		114 Indeks		113 Indeks		112 Indeks		112 Indeks				
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-		26 Skor		26 Skor		27 Skor		27 Skor				
	<b>2021 :</b> Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana			<b>2021 :</b> 1. Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana  2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%		-		-		-		-				
					100%		100%		-		-		-				

			3. Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100%		-		-		-		-			
	<b>2022 – 2024 :</b>		<b>2022-2024 :</b>												
	1. Tersampainya informasi kebencanaan secara berkala		1. Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	-		100%		100%		100%		100%			
	2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana melalui Pelatihan/Mitigasi		2. Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	-		100%		100%		100%		100%			
	3. Meningkatnya Jumlah Desa / Kelurahan Tanggap Bencana (Destana)		3. Jumlah Destana yang terbentuk	-		5 Desa/ Kelurahan		6 Desa/ Kelurahan		7 Desa/ Kelurahan		7 Desa/ Kelurahan			
	4. Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana		4. Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	-		100%		100%		100%		100%			
	5. Tertanganinya korban bencana		5. Persentase korban bencana yang tertangani	-		100%		100%		100%		100%			
	6. Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana		6. Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	-		100%		100%		100%		100%			

			<b>PROGRAM :</b>												
		1 . 0 5 . 0 1	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.75 Skor	1,939,072,000	81 Skor	2,182,695,000	81,5 Skor	2,280,000,000	82 Skor	2,456,000,000	82 Skor	8,857,767,000	
			KEGIATAN :												
		2 . 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	80,000,000	
			SUB KEGIATAN :												
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dok	20,000,000	12 dok	20,000,000	-	-	-	-	100%	40,000,000	
		. 0 6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	6 laporan	20,000,000	6 laporan	20,000,000	100%	40,000,000	

			KEGIATAN :													
		2 . 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	1,215,480,000	100%	1,276,195,000	100%	1,325,000,000	100%	1,376,000,000	100%	5,192,675,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	1,215,480,000	100%	1,276,195,000	-	-	-	-	100%	2,491,675,000		
		. 0 1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	13 orang/bulan	1,325,000,000	13 orang/bulan	1,376,000,000	13 orang/bulan	2,701,000,000		
			KEGIATAN :													
		2 . 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	260,000,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	50,000,000	100%	60,000,000	-	-	-	-	100%	110,000,000		
		. 0 9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	24 laporan	70,000,000	24 laporan	80,000,000	100%	150,000,000		

			KEGIATAN :													
		2 . 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	-	-	100%	100,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	210,000,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	100%	100,000,000	-	-	-	-	100%	100,000,000		
		. 1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	5 Unit	50,000,000	5 Unit	60,000,000	100%	110,000,000		
			KEGIATAN :													
		2 . 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	456,092,000	100%	505,000,000	100%	560,000,000	100%	625,000,000	100%	2,146,092,000		
			SUB KEGIATAN :													

			Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	100%	456,092,000	100%	505,000,000	-	-	-	-	100%	961,092,000		
		. 0 3	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	12 laporan	560,000,000	12 laporan	625,000,000	100%	1,185,000,000		
			KEGIATAN :													
		2 .0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	197,500,000	100%	221,500,000	100%	255,000,000	100%	295,000,000	100%	969,000,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional / lapangan yang layak digunakan	100%	157,500,000	100%	175,000,000	-	-	-	-	100%	332,500,000		
		. 0 2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	8 unit	195,000,000	100%	215,000,000	100%	410,000,000		

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100%	25,000,000	100%	30,000,000	-	-	-	-	100%	55,000,000		
		09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	1 unit	40,000,000	100%	50,000,000	100%	90,000,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100%	15,000,000	100%	16,500,000	-	-	-	-	100%	31,500,000		
		10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	5 unit	20,000,000	100%	30,000,000	100%	50,000,000		
			<b>PROGRAM</b>													
		10503	<b>Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Korban Bencana Yang Ditangani</b>	100%	1,388,869,000	100%	1,717,305,000	100%	2,065,000,000	100%	2,505,000,000	100%	7,676,174,000		
			KEGIATAN :													
		2011	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	103,880,000	100%	210,565,000	100%	225,000,000	100%	245,000,000	100%	784,445,000		

			SUB KEGIATAN :												
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Persentase dokumen yang disusun	-	-	100%	85,000,000	-	-	-	-	100%	85,000,000	
		. 0 1		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	-	-	-	1 dokumen	85,000,000	1 dokumen	85,000,000	100%	170,000,000	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	103,880,000	100%	125,565,000	-	-	-	-	100%	229,445,000	
		. 0 2		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	-	-	-	-	300 orang	140,000,000	300 orang	160,000,000	100%	300,000,000	
			KEGIATAN :												

		2 0 2	<b>Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1,198,689,000	100%	1,411,740,000	100%	1,690,000,000	100%-	1,960,000,000	100%	6,260,429,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0 1		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	-	-	-	1 dokumen	85,000,000	-	-	1 dokumen	85,000,000		
			Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan	100%	92,253,000	100%	141,350,000	-	-	-	-	100%	233,603,000		
		0 2		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	-	-	-	200 orang	155,000,000	200 orang	180,000,000	400 orang	335,000,000		
		0 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	-	-	-	-	5 unit	50.000.000	5 unit	75,000,000	5 unit	125,000,000		
			Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	100%	78,686,000	100%	90,000,000	-	-	-	-	100	168,686,000		

		06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	-	-	-	6 kawasan	100,000,000	7 kawasan	120,000,000	7 kawasan	220,000,000		
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	100%	86,350,000	100%	95,000,000	-	-	-	-	100%	181,350,000		
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	100%	941,400,000	100%	1,085,390,000	-	-	-	-	100%	2,026,790,000		
		08		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	-	-	-	-	37 orang	1,250,000,000	37 orang	1,400,000,000	37 orang	2,650,000,000		
		09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	85,000,000	1 dokumen	85,000,000		
		010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-	-	-	-	300 orang	50,000,000	300 orang	100,000,000	300 orang	150,000,000		
				<b>Tahun 2021 : Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana</b>	100%	86,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

			KEGIATAN :													
		2 . 0 3	<b>Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	86,300,000	100%	95,000,000	100%	100,000,000	100%	200,000,000	100%	481,300,000		
			SUB KEGIATAN :													
		. 0 3	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	-	-	-	12 orang	50,000,000	12 orang	100,000,000	12 orang	150,000,000		
			Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	100%	86,300,000	100%	95,000,000	-	-	-	-	100%	181,300,000		
		. 0 4		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	-	12 orang	50,000,000	12 orang	100,000,000	12 orang	150,000,000		
			KEGIATAN :													
		2 . 0 4	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	-	-	-	-	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	150,000,000		

			SUB KEGIATAN :												
		06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	-	-	-	-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	150,000,000	
					3,327,941,000		3,900,000,000			4,345,000,000		4,961,000,000		16,533,941,000	



## WALIKOTA MADIUN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYUDI ,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.**

Jabatan : **PJ WALIKOTA MADIUN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.

Madiun, 06 September 2024  
Pihak Pertama,  
  
WAHYUDI, S.Sos  
NIP 196711061990031009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.75 Indeks
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.20 Indeks
3.	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.40 Indeks

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.820.671.806
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.375.265.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.195.936.806</b>

Madiun, 06 September 2024  
**KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH**



**EDDY SURRIYANTO, S.STP., M.PSDM.**



**WAHYUDI, S.Sos**  
**NIP 196711061990031009**

**PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2025  
BERDASARKAN REALISASI TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.75 Indeks	85.87 Indeks	86.00 Indeks	
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.20 Indeks	92.31 Indeks	92.32 Indeks	
3.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.40 Indeks	0.51 Indeks	0.48 Indeks	Penentuan Target 2025 sebelum ada Nilai Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024 dari BPBD Provinsi Jawa Timur.

KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KOTA MADIUN


  
**H. WAHYUDI**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19671106 199003 1 009

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET			REALISASI		ANALISA CAPAIAN KINERJA	KET. TINDAK LANJUT
				KINERJA	SATUAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	85.75	Indeks	2.820.671.806	85.87	2.766.456.341	Nilai SAKIP tercapai melebihi target	
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		90.20	Indeks		92.31			
3.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah		0.40	Indeks		0.51		Indeks Ketahanan Daerah Kota Madiun telah tercapai melebihi target	

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN

  
**H. WAHYUDI**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19671106 199003 1 009



WALI KOTA MADIUN

# PLAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 060/6174/401.021/2024

Diberikan Kepada :

**Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah**

Sebagai

**TERBAIK IV**

Atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Kategori A dengan nilai 85,87

Madiun, 26 November 2024

P. Wali Kota Madiun



Eddy Supriyanto

3